

ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Suatu Kajian praktis dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan Pada Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan)

Oleh:

Yoto

Dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

E-mail : yoto.1718@yahoo.com

Abstrak: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara (UU RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1). Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, non formal dan in formal. Pendidikan nasional mempunyai visi "terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah". Untuk mencapai misi dan visi tersebut dibutuhkan pembiayaan pendidikan yang memadai. UU RI Nomor 20/2003 pasal 5 mengatur: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak semua warga negara dan mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik mutu maupun alokasi anggaran, pemerintah wajib memberikan layanan, kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diharapkan dapat direalisasi bisa menutup biaya pendidikan mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pada pendidikan tinggi. Kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembaharuan sistem pendidikan di negara Republik Indonesia. Peningkatan anggaran pendidikan merupakan "angin segar" bagi dunia pendidikan. Selain mengurangi beban bagi orang tua murid, juga peningkatan kesejahteraan bagi warga sekolah. Pendidikan merupakan media paling strategis dalam membentuk karakter bangsa dan mempertebal rasa nasionalisme. Melalui proses pembelajaran juga dapat dikembangkan *hard skills* dan *soft skills* peserta didik yang dapat meningkatkan daya saing pada era global.

Kata-kata kunci: Analisis Biaya, Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Pendidikan tidak hanya diperoleh dengan cara menempuh jalur formal saja, dengan cara datang, duduk, mendengar dan selanjutnya hingga akan memperoleh penghargaan dari test yang sudah dilewati. Namun, pendidikan dapat diperoleh dengan berbagai cara terlebih lagi dengan didukungnya media pembelajaran yang serba canggih dewasa ini. Pendidikan nasional mempunyai visi "terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Sejak Indonesia ditimpa krisis ekonomi tahun 1998 hingga sekarang, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pendidikan menurun. Pemerintah terpaksa harus mengurangi porsi dana rutin dan pembangunan, termasuk bidang pendidikan dari APBN karena harus dialihkan untuk membayar hutang baik dalam maupun luar negeri. Kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan berkurang karena daya beli mereka menurun.

Keputusan politik tersebut, memiliki orientasi yang sangat jelas, yaitu kemandirian dalam penyediaan SDM. Namun, keputusan politik ini tidak serta-merta berwujud realitas karena sebagian besar komponen dana dalam struktur APBN tidak dapat dialokasikan (*unallocated*), yaitu 34 persen untuk pembayaran utang dan 25 persen untuk dana perimbangan.

Di samping itu, keputusan politik tersebut masih mendapat keberatan-keberatan dari departemen lainnya yang merasa dikurangi “jatah” dalam APBN dengan alasan pada ekonomi Indonesia yang masih “morat-marit” belum memerlukan prioritas pada sektor pendidikan, tetapi pada sektor-sektor ekonomi untuk dapat memacu produktivitas dunia usaha. Anggapan tersebut sangat beralasan karena sampai saat ini pendidikan dituding belum dapat menghasilkan pelaku ekonomi atau pengusaha yang jangkakan memiliki kemampuan bersaing di era global, untuk survive saja mereka amat boros subsidi

bantuan likuiditas Bank Indonesia yang nyaris meluluhlantahkan ekonomi sejak masa krisis sampai sekarang.

Hingga Agustus 2007 pemerintah baru mengalokasikan 9-10 persen APBN, dari ketentuan konstitusi 20%, untuk pendanaan pendidikan, di luar gaji guru/dosen (Agus Suwignyo, 2007). Seperti diketahui bahwa rata-rata anggaran pendidikan sebesar 12%. Namun, distribusi dana yang telah dianggarkan bagi pendidikan (dasar-menengah-tinggi) itu harus ditelusuri agar jelas secara publik. Untuk menelusuri distribusi dana yang dianggarkan itu tentunya dibutuhkan informasi biaya pendidikan yang akurat melalui analisis pembiayaan pendidikan nasional secara keseluruhan. Analisis pembiayaan pendidikan ini sangat penting karena besar kecilnya biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa dan profesionalisme guru (Syarifudin dan Ichsan, 2006).

Kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan dapat membawa dampak positif pada pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah” (Imam, 2008). Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20/2003). Untuk mewujudkan visi itulah biaya pendidikan perlu ditingkatkan.

Di samping itu dengan diketahuinya secara wajar realisasi biaya pendidikan akan dapat dilihat apakah anggaran pendidikan sebesar Rp. 207.413.531.763.000,00 yakni 20% dari APBN (di tahun 2009) Rp.1.037.067.338.120.000,00 yang diharapkan dapat direalisasi dalam APBD 2009 bisa menutup biaya pendidikan. Banyak pihak yang mensyukuri dengan meningkatnya anggaran pendidikan tahun 2009 yang mencapai Rp. 207.413.531.763.000,00 tersebut, namun disisi lain ada kekawatiran Depdiknas gagap dalam menyalurkan dana tersebut. Kekawatiran ini bukan tidak beralasan, sebab laporan keuangan Depdiknas hingga periode 2008 masih memperoleh Opini *Disclaimer*.

PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM KEHIDUPAN

Tujuan sistem pendidikan nasional, manusia Indonesia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir batin, dan meningkatkan perannya sebagai pribadi, pegawai/karyawan, warga masyarakat, warga negara, dan makhluk Tuhan. Pendekatan sistem merupakan satu cara yang memandang pendidikan secara menyeluruh dan sistemik, tidak persial atau fragmentaris. Proses Pendidikan adalah proses transformasi atau perubahan kemampuan nyata untuk

meningkatkan taraf hidupnya lahir dan batin. Hasil pendidikan adalah lulusan yang sudah terdidik berdasarkan/mengacu kepada tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Sistem, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atau bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Menurut Coombs ada 12 subsistem dalam pendidikan yaitu; Tujuan, Murid/ Mahasiswa, Manajemen, Struktur dan jadwal waktu, Materi, Tenaga Pengajar dan pelaksana, Alatbantu belajar, Fasilitas, Teknologi, Kendali mutu, Penelitian, Biaya pendidikan.

Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/ pemerintahan, sistem pendidikan erat kaitannya dengan pengaruh dari sub-sistem yang lain (ekonomi, politik, sosial, dsb). Sistem pendidikan nasional juga merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem kehidupan di Indonesia saat ini.

a. Keterkaitan dengan Sistem Ekonomi

Berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.

Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan bahwa (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 54 disebutkan pula (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional saat ini akan dialihkan dari negara kepada masyarakat dengan mekanisme Badan Hukum Pendidikan (lihat RUU BHP dan PP tentang SNP No.19/2005) yaitu adanya mekanisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK serta Otonomi Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.

Ini berarti, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat semakin terkotak-

kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan jasa komoditas. Data dari Balitbang Depdiknas 2003 yang menyebutkan bahwa porsi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua/siswa berkisar antara 63,35%-87,75% dari biaya pendidikan total. Sedangkan menurut riset Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2006 di 10 Kabupaten/Kota se-Indonesia ternyata orang tua/siswa pada level SD masih menanggung beban biaya pendidikan Rp 1,5 Juta, yang terdiri atas biaya langsung dan tak langsung. Selain itu, beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat (selain orang tua/ siswa) hanya berkisar antara 12,22%-36,65% dari biaya pendidikan total (Koran Tempo, 07/03/2007). Menurut laporan dari bank dunia tahun 2004, Indonesia hanya menyediakan 62,8% dari keperluan dana penyelenggaraan pendidikan nasionalnya padahal pada saat yang sama pemerintah India telah dapat menanggung pembiayaan pendidikan 89%. Bahkan jika dibandingkan dengan negara yang lebih terbelakang seperti Srilanka, persentase anggaran yang disediakan oleh pemerintah Indonesia masih merupakan yang terendah (www.worldbank.com).

b. Keterkaitan dengan Sistem Sosial

Berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandaskan sekulerisme telah menyuburkan paradigma hedonisme (hura-hura), permisivisme (serba boleh), materialistik (money oriented), dan lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Dalam paradigma materialistikpun indikator keberhasilan belajar siswa setelah menempuh proses pendidikan dari suatu jenjang pendidikan saat ini adalah dengan perlakuan yang sama secara nasional pemerintah mengukurnya berdasarkan perolehan angka Ujian Nasional (UN) yang dahulu disebut sebagai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS), indikator itupun hanya pada tiga mata pelajaran saja (Matematika/Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) yang ketiganya tersebut berbasis pada aspek kognitif (pengetahuan). Pemerintah (Mendiknas) menilai bahwa UN sangat tepat untuk dijadikan sebagai alat ukur standar pendidikan, dan hasil UN sangat riil untuk dijadikan alat meningkatkan mutu pendidikan. Di sisi lain, aspek pembentukan kepribadian yang utuh dalam diri siswa, tidak pernah menjadi indikator keberhasilan siswa dalam menempuh suatu proses pendidikan, sekalipun dalam sekolah yang berbasis agama (Senin, 12/2/07) www.indonesia.go.id).

Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja (pelajar) yang di antara akibatnya menjerumuskan para pelajar pada seks bebas, terlibat narkoba, perilaku sarkasme/kekerasan (tawuran, perpeloncoan), dan berbagai tindakan kriminal lainnya (pencurian, pemerkosaan, pembunuhan) yang sering kita dapatkan beritanya dalam tayangan berita kriminal di media massa (TV dan koran khususnya), merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan yang selama berlangsung atau memang perlu adanya perubahan-perubahan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Namun karena kehidupan di tengah-tengah masyarakat secara umum berlangsung dengan sekuler, ditambah lagi dengan proses pendidikan dalam satuan pendidikan dalam kerangka sekulerisme juga, maka siklus ini akan semakin mengokohkan kehidupan sekulerisme yang makin meluas. Oleh karenanya standar kelulusan secara nasional bagi siswa, hendaknya juga melibatkan assesment (penilaian) terhadap aspek kepribadian (pola fikir dan perilaku) yang telah terbentuk dalam individu siswa berdasarkan hasil pendidikan (akhlak) di sekolahnya, selain juga assesment terhadap keterampilan yang telah dimiliki siswa untuk menempuh kehidupan di dalam masyarakat.

Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk 2000 – 2020 (Dalam Ribuan)

USIA	2000	2005	2008	2009	2010	2015	2020
(0-14)	62.969,0	61.981,0	61266.6	61016.5	60777.4	61822.8	62413.7
(15-64)	132.605,1	146280.9	154714.5	157496.8	160258.4	171067.3	180403.5
(64-70+)	9.557,9	10942.4	11798.0	12119.4	12441.6	14682.3	18187.8
Total	205132.0	219204.3	227779.1	230632.7	233477.4	247572.4	261005.0

Sumber: Adjikoesoemo, Maret 16, 2008

Jika dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, lihat pertumbuhan penduduk Indonesia yang per tahunnya mencapai 4 – 5 juta jiwa (Syarief, 2008). Menurutnya, penduduk Indonesia rata-rata mencapai tingkat pertumbuhan 2,32% selama kurun waktu 1971-1980. Secara rinci, Adjikoesoemo (2008) menyajikan gambaran tentang proyeksi jumlah penduduk seperti tampak pada Tabel 1.

Berdasarkan proyeksi tersebut penduduk Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan terus meningkat jumlahnya karena masih banyak jumlah wanita dalam usia reproduksi. Selain itu, angka harapan hidup diperkirakan meningkat dari 67,8 tahun pada periode 2000-2005 menjadi 73,6 tahun pada periode akhir proyeksi. Kondisi ini berarti membawa dampak pada meningkatnya biaya pendidikan.

c. Keterkaitan dengan Sistem Politik

Berlangsungnya kehidupan politik yang oportunistik telah membentuk karakter politikus machiavelis (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan Indonesia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi sektor pendidikan. Semua satuan pendidikan (sekolah) kelak akan menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Selain itu dalam beberapa kebijakan operasional sisdiknas yang dikeluarkan pemerintah yang didukung pula oleh dana yang jumlahnya tidak sedikit, ternyata dalam implementasinya banyak masyarakat yang menilai sering terjadi salah sasaran

bahkan penyimpangan. Koalisi Pendidikan menemukan beberapa kesenjangan (www.tokohindonesia.com), yakni saat untuk UN 2006/2007 pemerintah telah mengalokasikan subsidi dana Rp 244 milyar, untuk subsidi siswa SMP Rp 136 miliar, siswa SMA/MA Rp 93 miliar dan Rp 15 miliar lainnya untuk honor tim pemantau independen. Dengan adanya subsidi tersebut Mendiknas menyatakan bahwa otomatis peserta UN tidak dipungut biaya apapun alias gratis (www.indonesia.go.id), namun dalam operasionalnya dana tersebut diperuntukan juga untuk pembuatan soal, pencetakan dan penggandaan soal (yang tentu melibatkan perusahaan rekanan) serta hal-hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan UN (Permendiknas No. 45/2006).

KONSEP DAN PENTINGNYA PENINGKATAN BIAYA PENDIDIKAN

Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan.

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

Biaya pendidikan (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2004) dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter. Biaya pendidikan masih dianggap mahal oleh sebagian bangsa Indonesia sebagai akibat dari rendahnya pendapatan sebagian dari mereka. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini, pendidikan masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder bahkan tertier. Meskipun biaya sekolah telah diturunkan, masih ada keluarga Indonesia yang tidak mampu memasukkan anaknya ke sekolah. Daradjatun (2008) mengungkapkan bahwa berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional BPS, Maret 2008 jumlah penduduk miskin 34,96 juta orang atau sebesar 15,42%. Hasil survei Indonesian Research and Development Institute (IRDI) Maret 2008 pendapatan masyarakat per bulan rata-rata yang kurang dari Rp 600 ribu mencapai 64,58%. Jika dalam satu keluarga rata-rata empat orang, berarti per individu Rp. 150 ribu per bulan, di bawah standar kebutuhan yang layak per individu per bulan Rp 195 ribu perkiraan LIPI. Survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuktikan, alasan anak bekerja di jalan karena membantu pekerjaan orangtua sebanyak 71%, dipaksa membantu orangtua 6%, menambah biaya sekolah 15%.

Sedangkan alasan ingin hidup bebas, untuk uang jajan, dapat teman, dan lainnya sekitar 8%. Alasan ekonomi keluarga masih menjadi pendorong utama anak bekerja di jalan. Akibatnya sebanyak 13% anak jalanan mengalami putus sekolah dalam usia sekolah.

Dewasa ini pun masih ada orang tua yang tidak mampu menanggung biaya pendidikan anak-anaknya. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas tahun 2003 (World Vision International Indonesia, 2008) beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua/siswa berkisar 63,35% - 87,75% dari biaya pendidikan total. Biaya yang ditanggung pemerintah atau masyarakat (selain orang tua/siswa) hanya berkisar antara 12,25% - 36,65%. Akibatnya, tidak sedikit anak yang putus sekolah. Kendala biaya kerap menjadi faktor utama penghalang anak mengakses pendidikan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003 menunjukkan 67% masyarakat menyatakan bahwa ketiadaan biaya memaksa mereka memutuskan tidak bersekolah atau putus sekolah. Faktor lainnya adalah larangan orangtua, keharusan anak bekerja menopang kehidupan keluarga serta faktor geografis. Tabel 2 adalah data yang menunjukkan rendahnya akses pendidikan di negeri ini. Dikutip dari World Vision International Indonesia (2008).

Tabel 2. Angka Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk berusia dibawah 18 tahun	76.870.000
2	Angka partisipasi murni tingkat Sekolah Dasar	96%
3	Murid Sekolah Dasar berhasil mencapai kelas 5	95%
4	Tingkat putus sekolah Sekolah Dasar	14,5%
5	Angka partisipasi kasar Sekolah lanjutan Pertama	63%
6	Angka partisipasi kasar Sekolah lanjutan Menengah	17,1%
7	Tingkat buta aksara dewasa (15 tahun lebih)	9,6%
8	Indeks pembangunan manusia Indonesia (2007)	107 dari 177 negara

Sumber: UNICEF (2008), World Bank (2007), UNDP (2007)

Berdasarkan data dalam Tabel 1 tersebut, tampak bahwa masih ada 4% anak usia sekolah dasar yang tidak mengenyam pendidikan. Tingkat putus sekolah masih sebesar 14,5%. Angka partisipasi kasar sekolah lanjutan menengah hanya sebesar 17,1%. Bahkan di jaman yang serba modern dan mengglobal seperti dewasa ini, angka buta aksara untuk orang dewasa yang berusia 15 tahun atau lebih masih cukup besar, yaitu 9,6%.

Adanya anggapan dari sebagian masyarakat miskin bahwa pendidikan tertinggi bagi putra-putrinya cukup sampai SD sangat menghambat pencapaian pendidikan untuk semua (*education for all*). Kenyataan ini membuktikan bahwa pendidikan SD menjadi satu-satunya kesempatan bagi anak dari keluarga dan masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan formal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan SD menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan berbagai pihak untuk mengupayakan pendidikan dasar berkualitas yang mampu membekali anak dengan melek huruf yang fungsional guna mengembangkan kualitas kehidupannya secara optimal.

Sebenarnya, pemerintah telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal sebagai program keluarga harapan yang telah dilaksanakan di 73 kabupaten/kota. Di samping itu, juga disediakan beasiswa untuk lebih dari 1.000.000 siswa SD/MI, lebih dari 600.000 siswa SMP/MTs, 900.000 siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200.000 mahasiswa (Yudoyono, 2008). Hal itu dilakukan pemerintah untuk memberi

kesempatan yang lebih luas bagi semua warga negara untuk mengakses pendidikan.

Kualitas pendidikan tenaga pendidik pun menjadi pemicu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia (World Vision International Indonesia, 2008). Pada tahun 2004 hanya 9% guru SD bergelar sarjana, 44% berpendidikan D2, dan sisanya berpendidikan SPG. Guru SMP berpendidikan sarjana hanya sekitar 50%. Faktor penghambat lainnya adalah keengganan bersekolah, buku pelajaran yang kurang dan mahal serta ketipangan jender ikut mendorong rendahnya pendidikan masyarakat.

Penerapan sertifikasi guru dan dosen merupakan terobosan baru dari pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidik. Lebih-lebih jika diingat lonjakan kenaikan gaji yang akan mereka terima. Menurut informasi Mendiknas (dalam Mozilla, 2008) gaji guru PNS golongan IV/E bersertifikat profesi bisa mencapai Rp 6,9 juta. Gaji tersebut belum termasuk tunjangan fungsional dan tunjangan profesi untuk guru dengan sertifikat. Pemerintah juga memberikan tunjangan fungsional untuk guru tetap non-PNS yang belum sarjana Rp 250 ribu per bulan dan sarjana minimal Rp 300 ribu per bulan. Pendapatan 30 ribu guru daerah terpencil juga akan ditingkatkan. Jika sebelumnya gaji guru daerah terpencil yang bersertifikat Rp 2,29 juta pada 2008, tahun 2009 menjadi Rp 5,1 juta. Guru daerah terpencil yang belum bersertifikat sebelumnya mendapatkan Rp 2,29 juta ditambah menjadi Rp 3,6 juta. Bukan hanya guru, gaji dosen juga meningkat seiring dengan naiknya anggaran pendidikan. Jika sebelumnya dosen PNS golongan III/B tanpa sertifikat profesi dengan masa mengajar 0 tahun

mendapatkan Rp 1,8 juta, tahun 2009 bertambah menjadi Rp 2,26 juta. Untuk guru besar yang berstatus PNS golongan IV/E bersertifikat, gajinya naik tajam dari Rp 5,1 juta menjadi Rp 13,5 juta. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, kata Mendiknas, menempati porsi 27% dari anggaran pendidikan. Kenaikan anggaran pendidikan yang menjadi Rp 224,4 triliun pada RAPBN 2009 juga dimanfaatkan untuk percepatan penuntasan wajib belajar dari tingkat dasar hingga sekolah menengah. Menurut Mendiknas, anggaran pendidikan nanti terserap lebih dari 50 persen untuk program wajib belajar.

Pendidikan dapat dipandang sebagai investasi karena pendidikan yang berhasil akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi, mendorong perkembangan pendidikan, dan pendidikan yang maju merupakan salah satu persyaratan untuk perkembangan ekonomi selanjutnya. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, misalnya keadaan sosial ekonomi. Faktor kesenjangan sosial ekonomi akan mempengaruhi strategi dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan memberikan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal, budi pekerti dan kerohanian kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan penghidupan mereka di kemudian hari. Profesi yang diraih akan menempatkan mereka pada tingkat sosial ekonomi tertentu dan mempengaruhi perkembangan generasi seterusnya.

Kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang maju

dan berkepribadian Indonesia. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya (Sa'ud dan Abin, 2007).

CARA-CARA MEMPERKIRAKAN BIAYA PENDIDIKAN

Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Cara yang pertama dilakukan dengan cara meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini dibedakan atas (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya. Pengeluaran menyeluruh terdiri atas (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri. Pengeluaran menurut status dan sifatnya. Menurut statusnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMU dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya.

Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dan yang terpenting adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga

pendidikan. Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut.

Pemilihan unit-unit untuk penetapan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya: per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan, biaya unit per anak didik, rata-rata biaya kehadiran sehari-hari, biaya modal per tempat, biaya rata-rata per kelas, dan biaya berulang rata-rata per pendidik.

Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

KOMPONEN BIAYA PENDIDIKAN

Komponen-komponen biaya pendidikan meliputi komponen untuk:

- Peningkatan kegiatan belajar mengajar;

- Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan;
- Peningkatan pembinaan kegiatan siswa;
- Kesejahteraan;
- Rumah tangga sekolah; dan
- Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan.

Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah:

- Pembinaan tenaga kependidikan
- Pengadaan alat-alat belajar
- Pengadaan bahan pelajaran
- Perawatan
- Sarana kelas
- Sarana sekolah
- Pembinaan siswa
- Pengelolaan sekolah

Komponen-komponen utama manajemen keuangan yang mendukung terlaksananya optimalisasi komponen biaya-biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- Prosedur anggaran;
- Prosedur akuntansi keuangan;
- Pembelajaran, pergudangan dan pendistribusian;
- Prosedur investasi;
- Prosedur pemeriksaan.

Supriadi (2006) memberi gambaran biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua, berdasarkan perkiraan sekolah dan hasil penelitian kepada siswa ada 18 komponen seperti Tabel 3.

Jumlah biaya seluruh komponen tersebut untuk SMU Negeri di kota sebesar Rp 2.551.828,00; di pinggiran kota Rp 1.903.994, dan di desa Rp 1.281.736 per tahun.

Tabel 3 Komponen Biaya Pendidikan Siswa SD, SMP, SMA

No.	Komponen pengeluaran	Persentase
1	Uangpangkal/uang masuk	6,7
2	Iuran rutin sekolah	5,9
3	Ulangan/TPB	0,7
4	Kegiatan ekstra kurikuler	0,7
5	Praktikum*	0,3
6	Buku praktikum/latihan/LKS	4,2
7	Buku dan alat-alat tulis	5,6
8	Tas Sekolah	2,3
9	Sepatu sekolah	3,4
10	Transportasi di sekolah	15,8
11	Pakaian seragam sekolah	3,7
12	Pakaian olah raga	2,1
13	Les di sekolah oleh guru	2,8
14	Kursus/les di luar kelas	11,6
15	Karyawisata (study tour)	2,1
16	Sumbangan insidental	0,7
17	Uang saku/jajanan siswa	27,3
18	Biaya lainnya	4,1
Jumlah		100%

Sumber: Supriadi, 2006 : 157

* untuk SD tidak ada biaya praktikum

Biaya untuk tingkat Di SLTP Negeri hampir sama dengan di SMU Negeri, pengeluaran anak-anak di kota 1,3 kali pengeluaran anak-anak di desa. Biaya di tingkat SD kota Rp 1.263.788, di pinggiran Rp 581.708 dan di desa Rp 430.649 per tahun. Angka-angka tersebut merupakan perkiraan sekolah yang telah dikonfirmasi ke siswa melalui penelitian. Memang ada perbedaan jumlah, namun perbedaannya secara statistik tidak signifikan. Jumlah-jumlah tersebut berlaku untuk sekolah negeri, sekolah swasta tentu lebih besar dan lebih bervariasi. Dengan melihat jumlah tersebut kiranya bisa dimaklumi jika ada sebagian warga negara kita yang merasa berat untuk memikul biaya pendidikan tersebut, lebih-lebih jika di inggat hasil survei IRDI Maret 2008 yang menunjukkan

masih banyak masyarakat yang berpendapatan per bulan rata-rata yang kurang dari Rp 600 ribu, bahkan dalam kenyataannya banyak diantara mereka yang pendapatannya tidak tetap.

Tabel 1 diatas berlaku bagi siswa SD, SMP dan SMA; tidak berlaku bagi Siswa SMK yang pada dasarnya memerlukan biaya pendidikan lebih besar dari pada siswa sekolah menengah umum. Biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan bisa mencapai 200% atau lebih dari biaya pendidikan bagi sekolah umum, ini disebabkan anggaran untuk praktikum jauh lebih besar jika dibanding sekolah menengah umum. Jika anggaran praktikum untuk sekolah menengah umum mencapai 0,3% dari seluruh biaya pendidikan, untuk siswa SMK bisa mencapai 100%-150% dari total biaya pendidikan siswa sekolah menengah umum. Oleh karenanya biaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jauh lebih mahal dibanding Sekolah Menengah Umum, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana praktikum.

Dengan kenaikan anggaran biaya pendidikan, tentunya tidak semua biaya pendidikan ditanggung oleh orang tua, tetapi sebagian ditanggung oleh masyarakat melalui subsidi pemerintah. Perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan harus diciptakan bersama, melalui upaya peningkatan investasi dan relevansi pendidikan secara lebih merata dan meluas dalam berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

MENGUKUR BIAYA PENDIDIKAN

Didalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu (1)

pendekatan makro, dan (2) pendekatan mikro

1. Pendekatan makro

Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan disetiap negara. Satuan biaya pendidikan disetiap negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap jenjang di tiap negara, teknik yang dilakukan adalah dengan membandingkan biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya, yang bisa dilihat dari persentase GNP dari tiap negara.

2. Pendekatan mikro

Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total (*total cost*) dan jumlah biaya satuan (*unit cost*) menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan. Perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut:

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) : M(s,t)]$$

Keterangan:

- S_b : satuan biaya murid per tahun
- K : jumlah seluruh pengeluaran.
- M : jumlah murid
- s : sekolah tertentu,

t : tahun tertentu

Selain itu biaya pendidikan menurut Nanang Fattah (2002) tidak hanya berorientasi pada uang saja, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*oppurtunity cost*) yang sering juga disebut *income forgone* (potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran, atau menyelesaikan studi), yang dapat dihitung dengan formula berikut:

$$C = L + K$$

Keterangan:

- C : biaya pendidikan
- L : biaya langsung dan biaya tak langsung
- K : jumlah rata-rata penghasilan tamatan.

ANALISIS KEPUTUSAN INVESTASI DALAM PENDIDIKAN

Untuk menganalisis keputusan Investasi dalam pendidikan dapat menggunakan *Cost Benefit Analysis* atau *Rate of Return Analysis*.

Cost Benefit Analysis

1. Secara konseptual efisiensi pendidikan meliputi efisiensi atau disebut juga keefektifan biaya (*cost effectiveness*), dan efisiensi eksternal atau disebut manfaat biaya (*cost benefit*).
2. Cost benefit dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap dan keterampilan.
3. Dalam perhitungan investasi terdapat dua hal penting yaitu (1) Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar nilai instrinsiknya, (2) nilai guna dari kemampuan.
4. Analisis biaya manfaat (*cost benefit analysis*) merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan.

5. Metode Analisis biaya manfaat dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.

Rate of Return Analysis

1. Investasi dibidang pendidikan perlu untuk merespon kebutuhan ekonomi tenaga kerja menurut jenjang dan jenis pendidikan.
2. Analisis tingkat balik (*Rates of Return Analysis*) ekonomi dari investasi ini diperoleh dengan membandingkan produktivitas dari tenaga kerja terdidik yang biasanya digambarkan oleh profil upah dengan produktivitas tenaga kerja yang tidak terdidik.
3. Nilai investasi pendidikan dapat berbeda bergantung acuannya, apakah acuannya dari sudut pandang masyarakat atau individu.
4. Tidak semua biaya pendidikan ditanggung oleh individu, tetapi sebagian ditanggung oleh masyarakat melalui subsidi pemerintah.
5. Perluasan dan pembatasan pendidikan harus diciptakan bersama, dengan ini dilakukan upaya peningkatan investasi dan relevansi pendidikan secara lebih merata dan meluas dalam berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
6. Investasi pendidikan di negara-negara berkembang, dimana kondisi ekonomi sudah relatif maju dengan berbasis perindustrian, maka strategi investasi pendidikan diarahkan untuk memenuhi lapangan dunia kerja.
7. Pengembangan investasi pendidikan perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

8. Inventarisasi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek berdasarkan estimasi kebutuhan tenaga kerja dalam persektif jangka panjang merupakan peluang untuk melakukan investasi pendidikan.

TELAAH PERHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN

Untuk menelaah perhitungan satuan biaya pendidikan berikut penulis sajikan hasil kajian Dedi Supriadi (2006) dan Bappeda Kabupaten Bandung (2008)

Dedi Supriadi menampilkan pengeluaran biaya pendidikan siswa untuk tingkat SMK, SMA, dan SLTP dalam mengkaji satuan biaya pendidikan. Sementara itu Bappeda Kabupaten Bandung dalam hasil kajiannya membagi menjadi 4 (empat) unsur satuan biaya yakni (1) Pra Sekolah; (2) Pendidikan Dasar; (3) Pendidikan Menengah, dan (4) Luar Biasa. Masing-masing unsur tersebut mencakup pendidikan formal maupun non formal, kecuali pendidikan Luar Biasa. Selain komponen-komponen biaya yang perlu dibiayai, di dalam komponen tersebut pada kajian ini, aktivitas-aktivitas yang perlu di biayai dalam penyelenggaraan pendidikan di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung terdiri dari :

1. **Biaya Investasi**, terdiri dari komponen Investasi Lahan Pendidikan dimana aktivitas yang harus dibiayai adalah Sarana dan Prasarana (Bukan Personel); Sedangkan Komponen Investasi Non Lahan Pendidikan dimana aktivitas yang harus dibiayai adalah : 1) Pengembangan SDM (Pengembangan Personel); 2) Modal Kerja Tetap (Pembinaan Siswa, Rapat Dinas Pengawas, Operasional Komite Sekolah, Biaya Peningkatan

Mutu, Biaya Praktik Kerja Lapangan/ PKL).

2. **Biaya Operasional**, terdiri dari Komponen Biaya Personalia dan Biaya Non Personal Pendidikan Tak Langsung, dimana aktivitas yang dibiayainya adalah : 1) Bahan atau Peralatan Habis Pakai (ATK/Biaya ATS); 2) Daya (listrik); 3) Air; 4) Jasa Telekomunikasi (daya dan Jasa); 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Perbaikan ringan dan pemeliharaan); 6) Uang Lembur; 7) Transportasi; 8) Konsumsi; 9) Pajak; dan 10) Asuransi
3. **Biaya Personal (Pribadi Peserta Didik)**, terdiri dari Komponen Biaya Langsung PBM, dimana Aktivitas yang dibiayainya adalah 1) Iuran rutin (SPP); 2) Iuran Pembangunan (DSP); 3) Iuran Daftar Ulang (siswa lama); 4) Iuran Praktikum (laboratorium, bengkel/ wokshop); 5) Iuran Perpustakaan; 6) Iuran Kegiatan Ekstra Kurikuler; 7) Iuran Karya Wisata / Studi Tour; 8) Iuran Tes/Ulangan; 9) Iuran Kas Kelas; 10) Iuran OSIS; 11) Iuran Kegiatan Olahraga (Renang); 12) Pembelian Buku Pelajaran/Bahan Ajar; 13) Pembelian LKS; 14) Pembelian Buku Tulis; 15) Pembelian Alat Tulis; 16) Foto Copy Bahan pelajaran/tugas-tugas; 17) Pembelian bahan praktik laboratorium/keterampilan/kesenian/ olahraga; 18) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah; 19) Pembelian Pakaian Olahraga; 20) Kursus/les di sekolah oleh guru; dan Biaya Tidak Langsung Terhadap PBM dengan Aktivitas yang dibiayainya meliputi : 1) Sepatu Sekolah; 2) Sepatu Olahraga; 3) Tas Sekolah; 4) Transportasi ke sekolah (Umum/ Jemputan); 5) Uang saku/jajan siswa; 6)

Uang makan siang (bagi yang full day); 7) Kursus/les di luar sekolah; 8) *Try out* di luar sekolah; 9) Rental/Pembelian Komputer.

KESIMPULAN

1. Banyak pihak yang mensyukuri dengan meningkatnya anggaran pendidikan (tahun 2009) yang mencapai Rp. 207.413.531.763.000,00 atau 20% dari APBN selain gaji guru/dosen tersebut, namun disisi lain ada keawatiran Depdiknas gagap dalam menyalurkan dana tersebut. Kekawatiran ini bukan tidak beralasan, sebab laporan keuangan Depdiknas hingga periode 2008 masih memperoleh Opini *Disclaimer*.
2. Subsistem dalam pendidikan meliputi: Tujuan, Murid/Mahasiswa, Manajemen, Stuktur dan jadwal waktu, Materi, Tenaga Pengajar dan pelaksana, Alat bantu belajar, Fasilitas, Teknologi, Kendali mutu, Penelitian, Biaya pendidikan. Sistem pendidikan erat kaitannya dengan pengaruh dari sub-sistem yang lain (ekonomi, politik, sosial, dsb). Sistem pendidikan nasional juga merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem kehidupan di Indonesia saat ini.
3. Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya (Sa'ud dan Abin, 2007).
4. Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter.
5. Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu: (1) memperkirakan

biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

6. Di dalam menentukan biaya satuan terdapat dua pendekatan, yaitu: (1)

pendekatan makro, dan (2) pendekatan mikro.

7. Untuk menganalisis keputusan Investasi dalam pendidikan dapat menggunakan *Cost Benefit Analysis* atau *Rate of Return Analysis*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah N.S. 2008. *Pendidikan Sebagai Konsumsi dan Investasi Ekonomi*. <http://abd.wordpress.com/feed/>
- Adjikoesoemo. 2008. *Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2000-2025 Sebuah Peluang Dan Tantangan*. <http://bung-ak.blogspot.com/2008/03/proyeksi-penduduk-indonesia.html>
- Bappeda Pemerintah Kabupaten Bandung. 2008. *Analisis Budget Mapping Pendidikan di Kabupaten Bandung*. Bandung: Bappeda Pmda Tk. II Kabupaten Bandung
- Daradjatun, Adang. 2008. Merdeka dari Kemiskinan. <http://www.adangdaradjatun.com>
- Fattah, Nanang. 2002. *Ekonomi dan Biaya Pendidikan*. Bandung: PT. Rosda.
- Hallak, J. 1985. *Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. Paris: International Institute For Planning, UNESCO. <http://timpakul.hijaubiru.org/pendidikan.html>
<http://www.depdiknas.go.id>
<http://ayok.wordpress.com.2007/problematika.sistem.pendidikan.indonesia>
<http://zuhairistain.blogspot.com/2009/01/pendidikan.sebagai.sistem>
- Imam, Tengku. 2008. *Anggaran Pendidikan Dalam APBN 2009*. [http://bangimam.blog.dada.net/tag.tengku imam yahoo.co.id](http://bangimam.blog.dada.net/tag/tengku%20imam%20yahoo.co.id)
- Mastofa. 2008. *Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan*. <http://masofa.wordpress.com/feed/>
- Mozilla, 2004. *Biaya Pendidikan Lebih Banyak Ditanggung Orang tua Siswa*: <http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=08id=5026>
- Mozilla. 2008. *Anggaran Pendidikan 20% meningkatkan Kualitas Pendidikan?:* <http://www.lpmpjateng.go.id/blog/?p=582>
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun. 2007. *Perencanaan Pendidikan, Suatu Perencanaan apendidikan*. Bandung: Rosdakaya
- Senduk, Safir. 2000. *Menghitung Perkiraan Biaya Pendidikan*: <http://www.tabloitnova.com/artcles.asp?Id=2873>
- Supriyadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosdakaya
- Syaifuddin & Ichsan. A. 2007. *Analisis Dampak Pendidikan Terhadap Mutu Pendidikan di MIJS Malang* Postard, Oleh Sumanto. Malang: MIJS
- Syarief, Sugiri. 2008. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia 5 Juta Per Tahun* <http://en-US.www.Mozilla.com/en-US/firefox/central>
www.worldbank.com
www.tokohindonesia.com
www.indonesia.go.id
- Yudoyono, S.B. 2000. *Sambutan Presiden RI pada acara puncak peringatan hari guru Nasional 2008, 2 Desember 2008*. <http://www.setneg.go.id>

-----, 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)*. Yogyakarta: Yustisia.

-----, 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Himpunan*

Undang-Undang Guru dan Dosen. Bandung: Fokus Media

-----, 2008. Pendidikan untuk Semua dalam *World Vision International Indonesia*: www.worldvision.or.id Kompas, 29/ 10/04